

Efektivitas Program “Ngapling” Ngaspal Keliling di Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2021

Riska Ayu Pradila, Suji, Dina Suryawati

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Jl.Kalimantan No 37 Tegal Boto, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember

riskadila16@gmail.com

Abstract

The Lumajang Regency Government through the Public Works and Spatial Planning Office created the NGAPLING (Ngaspal Keliling) program which aims to quickly overcome potholes. Ngapling is a program with a patchwork system focusing on damage under 15% according to the Plt. Decree (SK). Head of Public Works and Spatial Planning Office of Lumajang Regency Number 188.45/037/427.59/2021. Because the focus in this study is the effectiveness of the ngapling program, the concept used is public policy using Ripley's effectiveness indicator. Effectiveness indicators according to Ripely have 7 indicators namely access, coverage, frequency, bias, accuracy of services, accountability, suitability of programs with needs. The type of research that will be taken in this research is descriptive research with a qualitative approach. The results of this study indicate that the implementation of the Ngapling program in Lumajang Regency, it can be concluded that in the process of implementing the ngapling program in Lumajang Regency, the researchers obtained research results that the implementation of the ngapling program was effective. This can be seen from the results of the research process that has been carried out which shows indicators of effectiveness.

Keyword: Road Damage, Program Effectiveness, Ngapling, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang membuat program NGAPLING (Ngaspal Keliling) yang tujuannya mengatasi jalan berlubang secara cepat. Ngapling merupakan sebuah program bersistem tambal sulam dengan berfokus pada kerusakan dibawah 15% sesuai dengan surat keputusan (SK) Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/037/427.59/2021. Karena fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas program ngapling (ngaspal keliling) maka konsep yang digunakan adalah kebijakan publik dengan menggunakan indikator efektivitas Ripley. Indikator efektivitas menurut Ripely memiliki 7 indikator yaitu akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas, kesesuaian program dengan kebutuhan. Tipe penelitian yang akan diambil dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Ngapling di Kabupaten Lumajang, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pelaksanaan program ngapling di Kabupaten Lumajang, peneliti memperoleh hasil penelitian yakni pelaksanaan program ngapling sudah efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan yang menunjukkan indikator keefektifan.

Kata Kunci: Kerusakan Jalan, Efektivitas Program, Ngapling, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

1. Pendahuluan

Kondisi sistem jaringan di Kabupaten Lumajang sampai dengan tahun 2019 panjang total mencapai 1.109,00 km. Adapun jalan yang berada dalam kondisi baik dan sedang (mantap) mencapai 81,75 persen. Dalam persentasenya, jumlah jalan mantap lebih banyak dibandingkan dengan jalan yang mengalami kerusakan, baik itu sedang, rusak maupun rusak berat. Meskipun begitu, jalan yang tidak sehat yang dalam hal ini adalah berlubang, bergelombang dan retak adalah jalan yang sangat membahayakan masyarakat pengguna jalan raya. Jalan bermasalah tersebut dapat membahayakan pengguna jalan, menyebabkan kerusakan pada kendaraan serta dapat menghambat laju transportasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada laju perekonomian. Maka dari itu pemerintah sebagai aparatur Negara yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lumajang bertugas sebagai penyelenggara jalan terus berupaya memberikan prasarana transportasi yang baik bagi masyarakat.

Menurut data yang diambil dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kabupaten Lumajang tahun 2019. Pada tahun 2019, kenaikan realisasi atas indeks layanan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah 7,6% dimana hal telah melampaui target kinerja sebesar 5,5 % sehingga capaian kinerja atas indikator tersebut adalah 138,18%. Meskipun capaian kinerja telah mencapai 138,18%, namun untuk semakin meningkatkan kualitas layanan infrastruktur tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang membuat *NGAPLING* (Ngaspal Keliling) yang tujuannya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Lumajang dalam mengatasi jalan berlubang secara cepat dan singkat. Program tersebut telah diresmikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 bertempat di PT. Alliance One Indonesia, Kecamatan Tempeh. Peresmian acara ngapling juga dihadiri oleh asisten perekonomian dan pembangunan Sekda Kabupaten Lumajang Yos Sudarso, Kepala Organisasi Perangkat Desa (OPD) terkait, serta Camat se-Kabupaten Lumajang. Diawali dengan pemberian kunci. Dalam sambutannya, Bupati menuturkan, program ngapling dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, yang mana infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satu hal yang melatarbelakangi diterapkannya program ngapling adalah kondisi sistem jaringan jalan di Kabupaten Lumajang di tahun 2019 yang kondisinya rusak berat bertambah jika dibandingkan tahun 2018, yaitu naik 38,25% dari 113,83 km menjadi 157,37 km. Kondisi sistem jaringan jalan di Kabupaten Lumajang di tahun 2019 yang kondisinya rusak berat bertambah jika dibandingkan tahun 2018, yaitu naik 38,25% dari 113,83 km menjadi 157,37 km.

Upaya yang diambil pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas PUTR Kabupaten Lumajang adalah pemberlakuan program yakni *NGAPLING* (Ngaspal Keliling). *Ngapling* merupakan sebuah program bersistem tambal sulam dengan berfokus pada kerusakan dibawah 15% sesuai dengan surat keputusan (SK) Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/037/427.59/2021. Meskipun hanya berfokus pada kerusakan dibawah 15%, diharapkan dengan adanya program ini dapat memperpanjang umur jalan dan merupakan gerakan cepat sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih parah pada jalan Kabupaten Lumajang. Dalam pelaksanaannya Dinas PUTR Kabupaten membentuk tim khusus pada setiap korwil (koordinator wilayah) untuk memantau kondisi jalan pada jalur kabupaten. Selain itu, Dinas PUTR juga melakukan

sosialisasi dan juga menyediakan berbagai wadah baik *offline* maupun *online* agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program Ngapling. Dasar hukum yang digunakan sehingga terlaksananya program *Ngapling* di Kabupaten Lumajang adalah: a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34; b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004; dan c) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jalan. Berdasarkan pada dasar hukum tersebut terbentuk surat keputusan program *ngapling* yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang yang termasuk ke dalam Perda Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Efektivitas Program ‘Ngapling’ Ngaspal Keliling di Kabupaten Lumajang tahun 2019 - 2021**” Bagaimanakah efektivitas program *ngapling* dalam menangani kerusakan jalan di Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 hingga 2021? Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program *ngapling* tahun 2019 hingga 2021 dalam menangani kerusakan jalan di Kabupaten Lumajang. Sedangkan manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian yaitu manfaat teoritis dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta tambahan teori yang berhubungan dengan program atau kebijakan publik dalam ilmu administrasi negara. Dan manfaat praktisnya penelitian ini dapat berguna bagi Dinas Bina Marga PU Kabupaten Lumajang untuk mengetahui keefektifan program *ngapling* dalam penanganan prasarana jalan yang rusak.

Administrasi Publik

Berdasarkan ilmu administrasi, administrasi publik adalah sebuah administrasi yang menunjang tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui perundang-undangan dan dalam bentuk hukum publik lain sehingga dapat bersifat publik atau kenegaraan. Administrasi publik merupakan seni dan ilmu organisasi dan manajemen manusia untuk mengatur urusan-urusan negara guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kebijakan Publik

Beberapa isi dari kebijakan yang diuraikan oleh Jones dalam Abidin (2012, hal. 6), bahwa : 1) Tujuan adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (*the desired ends to be achieved*), bukan sesuatu tujuan yang sekedar diinginkan saja; 2) Rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya; 3) Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud; 4) Keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program; dan 5) Dampak (*effect*), yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Bentuk Kebijakan Publik

Rentetan kebijakan publik sangat banyak, namun demikian kebijakan publik dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut; 1) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu: UUD 1945, Tap MPR, Undang-undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden; 2) Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota.

Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota; dan 3) Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Dunn dalam Winarno (2012, hal. 36) berikut adalah tahap-tahap kebijakan publik: Penyusunan Agenda Formulasi Kebijakan - Adopsi Kebijakan Implementasi - Kebijakan - Evaluasi Kebijakan.

Pengertian Program

Terbuatnya sebuah program merupakan sebuah jalan keluar yang diambil pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Berjalannya program juga sebagai bentuk percepatan pemberian layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan program merupakan sebuah kebijakan publik yang dibentuk oleh pihak yang berwenang sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat.

Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan sebuah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dengan kurang waktu yang telah ditetapkan.

Efektivitas Program

Efektivitas program merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Indikator Efektivitas Siagian (1997, hal. 153) mengemukakan ukuran efektivitas sebagai berikut : 1) Ukuran waktu, yaitu berapa lama seseorang yang memperoleh jasa untuk memperolehnya; 2) Ukuran harga, dalam arti nenerapa seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh jasa yang dibutuhkannya itu; 3) Ukuran nilai-nilai social budaya dalam arti cara penghasil jasa menyampaikan produknya kepada klien telinya; dan 4) Ukuran ketelitian yang menunjukkan apakah jasa yang diberikan akurat atau tidak.

Ukuran- ukuran untuk efektivitas, menurut Gibson dkk (1989, hal. 34) indikator efektivitas dapat diukur: 1) Produktivitas yaitu merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu *output* sesuai dengan permintaan lingkungan; 2) Kualitas yaitu suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan; 3) Efisiensi yaitu merupakan perbandingan (*ratio*) antara *output* dengan input; 4) Fleksibilitas respons terhadap suatu organisasi atau perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu organisasi; 5) Kepuasan yaitu merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat; 6) Keunggulan yaitu kemampuan bersaing dari organisasi dan anggota organisasi terhadap perubahan-perubahan yang ada; 7) Pengembangan yaitu merupakan

mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

Dari beberapa pendapat tokoh yang telah dikemukakan, peneliti memilih indikator efektivitas menurut ripley, hal ini dikarenakan indikator efektivitas milik ripley sangat kompleks untuk menguji efektivitas program ngapling yang diterapkan di kabupaten Lumajang. Indikator atau aspek yang harus dipenuhi untuk menilai efektivitas sebuah program adalah sebagai berikut: (Erwan dan Dyah 2012, hal. 105-110)

1. Akses

Kemudahan dalam menjangkau program atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah merupakan sebuah indikator akses. Kelompok sasaran kebijakan yang dalam hal ini adalah masyarakat harus memiliki kemudahan akses untuk bisa menghubungi pihak terkait untuk menggali informasi ataupun mengajukan keluhan.

2. Cakupan

Prosedur yang dapat digunakan untuk mengukur cakupan adalah menetapkan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran dan membuat perbandingan antara jumlah kelompok sasaran yang sudah mendapat layanan terhadap total kelompok target. Dalam penelitian ini cakupan (*coverage*) diartikan sebagai kelompok sasaran yang telah dijangkau dalam pelaksanaan program “Ngapling” Ngaspal Keliling.

3. Frekuensi

Indikator frekuensi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak suatu kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Tinggi rendahnya frekuensi layanan yang diberikan akan berpengaruh pada baik buruknya implementasi kebijakan atau program tersebut.

4. Bias

Indikator bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah dalam pelaksanaan kebijakan atau program, pelayanan yang diberikan oleh implementor terjadi bias (penyimpangan) kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk menikmati pelayanan yang seharusnya bukan untuk mereka. Dalam penelitian ini bias diartikan sebagai ketepatan target layanan program Ngapling pada kelompok masyarakat penggunaan jalan.

5. Ketepatan Layanan

Indikator ketepatan layanan (*service delivery*) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator ini sangat penting untuk menilai *output* suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Artinya jika terjadi keterlambatan dalam implementasi program tersebut akan membawa implikasi kegagalan mencapai tujuan program tersebut.

6. Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah tidak para implementor dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelaksana kebijakan atau program kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah menyangkut apakah hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak.

7. Kesesuaian program dengan kebutuhan

Indikator kesesuaian program dengan kebutuhan ini digunakan untuk menilai apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Prasarana jalan yang baik merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh dinas terkait. Mengingat prasarana jalan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam mobilitas masyarakat setiap harinya. Program *ngapling* merupakan sebuah program yang dibuat untuk memberikan percepatan penanganan jalan rusak dan berlubang dibawah 15% pada jalan jalur Kabupaten di Kabupaten Lumajang. Dalam penelitian ini indikator kesesuaian program dengan kebutuhan diartikan sebagai kesesuaian program *ngapling* dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan perbandingan indikator menurut para ahli diatas peneliti mengambil indikator dari Ripley karena indikator tersebut lebih relevan dengan masalah yang ada di lapangan.

Kriteria Evaluasi Efektivitas Program

Target pencapaian tujuan dari usaha-usaha yang dilakukan dalam evaluasi kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan kriteria efektivitas. Maka, menurut peneliti kriteria ini relevan dengan *research problem* pada penelitian ini yaitu mengenai pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan melihat pada aspek pelaksanaan program “*Ngapling*” Ngaspal Keliling yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Lumajang. Aspek utama untuk mengukur kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu aspek *output* dan *outcome*. Dari kedua aspek tersebut, yang relevan dengan penelitian ini yaitu aspek *output* karena lebih menekankan pada proses pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Aspek *output* digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsidi dan lain-lain yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan atau program (Erwan dan Dyah, 2012, hal. 106).

2. Metodologi

Tipe penelitian yang akan diambil dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan dan mekanisme program *Ngapling*. Sedangkan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pada efektivitas program *ngapling* dalam percepatan pemberian layanan prasarana jalan yang baik kepada pengguna jalan di Kabupaten Lumajang. Beberapa Informan sebagai sumber data sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Nama-nama Informan

No	Nama	Jabatan
1	Afandi	Sub Koordinat Bina Manfaat Bidang Bina Marga
2	Heri Kurniawan, ST, MT	Sub Koordinator Pembangunan dan Rehabilitasi
3	Ahmad Zamroni	Sekretaris Desa Sidorejo
4	Eka	Kepala Desa Wonorejo
5	Saiful	Sekretaris Desa Munder

3. Hasil dan Diskusi

Profil Dinas PUTR Kabupaten Lumajang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (disingkat KemenPUPR RI) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sekaligus membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dari masa ke masa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalami begitu banyak transisi organisasi. Bermula dari zaman penjajahan Belanda, istilah “Pekerjaan Umum” merupakan istilah dari bahasa Belanda “*Openbare Werken*” yang pada zaman Hindia Belanda disebut “*Waterstaat swerken*”. KemenPUPR RI terus berevolusi hingga saat ini disebut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memiliki fungsi sebagai berikut: a) perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; b) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; d) pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Program *Ngapling*

Program *Ngapling* merupakan sebuah program yang diluncurkan guna mendukung percepatan perbaikan prasaranan jalan di Kabupaten Lumajang. Perbaikan prasarana jalan yang tergolong dalam program *Ngapling* yaitu jalan yang memiliki kerusakan dibawah 15% serta khusus jalan milik Kabupaten Lumajang. Program *Ngapling* (Ngaspal Keliling) diluncurkan oleh Bupati Lumajang Thoriq Haq sebagai solusi Pemkab Lumajang untuk menjawab keresahan masyarakat tentang infrastruktur jalan Kabupaten yang mengalami kerusakan. *Ngapling* diluncurkan bupati di Jalan Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Kamis (24/10/2019). Menurut data yang diambil dari infopublik.id dijelaskan Bupati bahwa *Ngapling* dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar persoalan infrastruktur jalan rusak dapat diatasi lebih cepat.

Humas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lumajang, menuturkan bahwa pihaknya setiap hari selalu menerjunkan anggotanya mencari jalan rusak atau berlubang untuk diperbaiki. Masyarakat juga dapat melaporkan apabila ada jalan rusak melalui *Call Center Ngapling* di nomor 08113396445 atau melalui Grup *Facebook* Lapor Lumajang maupun alamat *web* yang telah disediakan. Laporan masuk hingga dilakukan penanganan akan langsung diproses paling lama 3 x 24 jam.

Pada bagian ini peneliti melakukan analisis dari penelitian yang terkumpul melalui teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi terkait dengan

efektifitas pelaksanaan program *ngapling* di Kabupaten Lumajang. Efektivitas merupakan keadaan yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Menurut Ripley, indikator atau aspek yang harus dipenuhi untuk menilai kualitas *policy output* adalah akses; cakupan; frekuensi; bias; ketepatan layanan; akuntabilitas; kesesuaian program dengan kebutuhan. (Erwan dan Dyah2012, hal. 105-110)

Program *Ngapling* merupakan sebuah program yang diluncurkan oleh Dinas PUTR Kabupaten Lumajang sebagai jawaban dari keluhan masyarakat mengenai jalan rusak di Kabupaten Lumajang. Program tersebut mengatasi kerusakan jalan lintas Kabupaten di bawah 15%. Menggunakan sistem perbaikan tambal sulam diharapkan program *ngapling* dapat memperpanjang umur jalan dan mencegah kerusakan yang makin parah. Semua pihak dapat turut serta dalam pelaksanaan program *ngapling*. Masyarakat dapat langsung mengirimkan aduan mengenai jalan yang berlubang kepada Dinas PUTR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada banyak media yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pengaduan seperti melalui media sosial *facebook* maupun alamat *web* resmi milik Dinas PUTR Kabupaten Lumajang atau langsung mengirimkan melalui Kantor Dinas PUTR Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan teori milik Ripley pada faktor akses berpengaruh terhadap efektifitas program *ngapling*, karena akses merupakan wadah bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pelaporan mengenai jalan rusak di Kabupaten Lumajang. Baik buruknya kemudahan masyarakat dalam mengakses program mempengaruhi keefektivitasan program itu sendiri. Dalam penelitian yang dilakukan pada Dinas PUTR mengenai program *ngapling* menunjukkan bahwa akses yang dimiliki sudah cukup mumpuni terbukti dengan adanya beberapa kemudahan seperti tersedianya *call center* dan juga media sosial yang digunakan sebagai media pelaporan. Selain itu masyarakat juga dapat melakukan kegiatan pelaporan langsung ke kantor Dinas PUTR Kabupaten Lumajang. Namun perlu dilakukan tindakan sosialisasi yang lebih sehingga makin banyak pihak masyarakat yang mengetahui adanya program tersebut. Tindakan kerja sama antar instansi seperti halnya kerja sama dengan desa – desa yang ada di Kabupaten Lumajang juga berpengaruh terhadap penerapan program *Ngapling*.

Berdasarkan teori milik Ripley pada penelitian ini, faktor cakupan diartikan sebagai target sasaran yang telah dijangkau dalam pelaksanaan program “*Ngapling*” Ngaspal Keliling. Tujuan utama dibentuknya program *ngapling* adalah sebagai program untuk mewujudkan jalan mantap di Kabupaten Lumajang. Target sasaran dituju dalam pengadaan program *ngapling* adalah seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang alamat tinggal. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya orang yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaporan pada program *ngapling* semakin cepat juga penanganan yang dilakukan. Selain itu, saat percepatan penanganan akan mempengaruhi kondisi baik buruknya jalan yang akan digunakan oleh seluruh masyarakat. Maka dari itu diperlukan kerja sama dari segala latar belakang masyarakat demi kelancaran proses program *ngapling*.

Berdasarkan teori milik Ripley pada faktor frekuensi diartikan sebagai intensitas kelompok sasaran yakni setiap pengguna jalan dalam memperoleh layanan program ngaspal keliling. Layanan program *ngapling* masih diberlakukan hingga saat ini. Siapa saja boleh melakukan kegiatan pelaporan jalan rusak dan tidak terbatas frekuensinya. Perbaikan berulang pada ruas jalan yang sama juga pernah

dilakukan. Kurangnya kerja sama antar berbagai pihak membuat umur jalan tidak lama. Tidak jarang pihak PUTR melakukan perbaikan jalan berulang pada sejumlah titik di jalan jalur Kabupaten.

Berdasarkan teori milik Ripley pada faktor bisa diartikan sebagai ketepatan target layanan program *ngapling* pada kelompok masyarakat penggunaan jalan. Layanan program *ngapling* sudah diberlakukan sesuai dengan kewenangannya yaitu untuk jalan lintas kabupaten sehingga target layanan juga sesuai. Program *Ngapling* adalah sebuah program yang buat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lumajang sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kaadaan jalan yang baik merupakan salah satu faktor terbentuknya kenyamanan berkendara. Maka dari itu program *ngapling* dipilih agar dapat mempertahankan umur jalan dan sebagai jawaban Dinas PUTR terhadap keresahan masyarakat terkait jalan rusak di Kabupaten Lumajang. Kelompok sasaran yang dituju dalam pengadaan program *ngapling* adalah seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang alamat tinggal. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya orang yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaporan pada program *ngapling* semakin cepat juga penanganan yang dilakukan. Selain itu, saat percepatan penanganan akan mempengaruhi kondisi baik buruknya jalan yang akan digunakan oleh seluruh masyarakat. Maka dari itu diperlukan kerja sama dari segala latar belakang masyarakat demi kelancaran proses program *ngapling*.

Berdasarkan teori milik Ripley pada faktor ketepatan layanan diartikan sebagai ketepatan waktu dalam pengimplementasian suatu program. Indikator ini sangat penting untuk menilai *output* suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Program *ngapling* memiliki target waktu yang cepat mulai dari diterimanya laporan aduan hingga dilakukannya penanganan yakni 3x24 jam. Program akan terus diberlakukan hingga terciptanya jalan mantap di Kabupaten Lumajang. Meskipun begitu Dinas PUTR terus melakukan pemantauan dan juga penentuan target yang harus dicapai pada tiap tahunnya sehingga kualitas dari program tersebut tidak mengalami penurunan.

Berdasarkan teori milik Ripley pada faktor akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksana kebijakan atau program kepada kelompok sasaran. Dalam penelitian ini mengacu pada kesesuaian pemanfaatan dana yang ada untuk terlaksananya program *ngapling*. Dari data yang didapatkan menunjukkan bahwa akses infrastruktur kabupaten dari tahun ke tahun tergolong dalam kriteria capaian sangat berhasil. Anggaran dana yang digunakan banyak didapat dari pemerintah pusat dan APBD Kabupaten Lumajang lalu disalurkan ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Untuk menjaga kualitas program Dinas terkait terus melakukan berbagai kegiatan evaluasi.

Berdasarkan teori milik Ripley pada faktor kesesuaian program dengan kebutuhan diartikan sebagai kesesuaian program *ngapling* dengan kebutuhan masyarakat. Jalan merupakan salah satu fasilitas publik yang paling dibutuhkan masyarakat, maka dari itu untuk mempertahankan kemantapan kondisi jalan Dinas PUTR Kabupaten Lumajang melakukan penerapan program *ngapling*. Program *ngapling* merupakan program perbaikan jalan yang mengalami kerusakan di bawah 15% dan untuk mempercepat pengerjaannya dilakukan pembagian kerja pada setiap wilker (wilayah kerja). Dinas PUTR bekerja sendiri dalam program ini, mengacu pada kinerja pada setiap wilker dan juga laporan yang masuk. Meskipun telah dilakukan berbagai sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung masih

banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program *ngapling* di Kabupaten Lumajang. Kerja sama dengan pemerintahan tingkat desa juga dirasa masih kurang, terbukti pada wawancara acak yang dilakukan dengan beberapa desa di Kabupaten Lumajang yang menunjukkan bahwa mereka kurang terlalu memahami mengenai program *ngapling*.

4. Kesimpulan

Program *ngapling* diluncurkan sebagai jawaban atas keluhan masyarakat mengenai kualitas jalan di Kabupaten Lumajang. Program *ngapling* merupakan sebuah program yang berfokus pada kerusakan jalan dibawah 15%. Bersistem perbaikan tambal sulam, penanganan program *ngapling* hanya berfokus pada perbaikan jalan pada lintas Kabupaten. Untuk mempercepat kinerja Dinas PUTR melakukan pembagian kerja pada setiap wilker (wilayah kerja). Masyarakat juga dapat melakukan kegiatan pelaporan tanpa adanya batasan jumlah laporan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Berdasarkan penyajian hasil dan analisis data tentang Efektivitas Pelaksanaan Program *Ngapling* di Kabupaten Lumajang, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pelaksanaan program *ngapling* di Kabupaten Lumajang, peneliti memperoleh hasil penelitian yakni pelaksanaan program *ngapling* sudah efektif. Program *ngapling* telah memenuhi tujuan pokok kinerja program *ngapling* yang telah dirancang Dinas PUTR Kabupaten Lumajang. Namun di sisi lain untuk dapat menyempurnakan jalannya program tersebut dibutuhkan kerja sama yang baik antar berbagai pihak. Pemerintah dalam hal ini Dinas PUTR Kabupaten Lumajang harus selalu meningkatkan kinerja dan mengevaluasi hasil program guna meningkatkan sasaran program. Dalam melihat permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori Ripley dengan tujuh faktor yaitu akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Faktor tersebut berguna untuk melihat seberapa efektif sebuah program berjalan.

Daftar Pustaka

- Erwan dan Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 2021. *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi*. Jember : UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember.
- Krisdayanti. 2018. *Evaluasi dan Pelaporan Pemeliharaan Jalan di Dinas Pekerjaan Umumdi Kabupaten Takalar*. Universitas Muhammadiyah Makasar
- Lestari, Putri. 2019. *Efektivitas pelaksanaan Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tenggara*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan.
- Nawawi. Hadari. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Pers
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor: 08 Tahun 2015 tentang *Penyelenggaraan Jalan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34
- Saldanaet.al. 2014. *Qualitative Data Analysis. America: SAGE Publications*

- Subarsono, A.G. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung : Alfabeta Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
Nomor: 188.45/037/427.59/2021 tentang *Penetapan Standart Pelayanan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang*
- Suwitri, Sri. 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Syamsi, Ibnu. 2007. *Efisiensi, Sistem, dan Prosedur Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2005. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tjokroamidjojo, Bintoro.1990. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV.Masagung.
- Triana, Rochyati Wahyuni. 2011. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- Usman, Husaini. Akbar, Purnomo S. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Winarno, Budi. 2012. *Teori, Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Caps.
- Wirdayanti. 2021. *Implementasi Program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Waampone Kabupaten Bone*. Universitas Muhammadiyah Makasar
- Wulandari Atur Rezeki, Putri. 2016. *Efektivitas Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung*. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I. Lembaga Administrasi Negara

